

Demokrasi Berbagi: Mobilisasi pengetahuan dan informasi*

Roby Muhamad, Ph.D

Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia

Alasan yang mendukung sistem demokrasi seringkali mengacu pada superioritas nilai-nilai yang dianggap mendasari demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan pluralisme.

Tanpa menafikan pentingnya nilai-nilai tersebut, perlu juga kita pikirkan alasan lebih praktis mengapa demokrasi merupakan sistem terbaik untuk memecahkan masalah di era global. Wajar kita bertanya bagaimana demokrasi mampu mengelola keragaman yang begitu tinggi yang dimiliki Indonesia dan membuat keragaman jadi kekuatan utama bangsa? Jika memang mampu, lalu bagaimana caranya?

Secara konseptual, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana mengelola keragaman. Keragaman perlu dikelola untuk menekan konflik dan, yang lebih penting, adalah pemanfaatan keragaman untuk menyelesaikan berbagai masalah. Keragaman adalah modal utama bangsa untuk sintas dalam dunia global yang semakin terkoneksi satu sama lain. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif, tetapi yang pasti globalisasi meningkatkan ketidakpastian. Ketidakpastian muncul dari terbentuknya koneksi-koneksi baru sehingga apa yang terjadi di tempat lain akan dengan cepat terasa efeknya oleh kita. Efek jejaring inilah yang meningkatkan ketidakpastian. Akibatnya, perubahan terjadi dengan cepat sehingga solusi terbaik saat ini akan cepat kadaluwarsa.

Keragaman adalah senjata utama menghadapi dunia yang cepat berubah. Dengan adanya keragaman, kita bisa mendapatkan dua hal. Pertama, keragaman memungkinkan kita untuk mencoba banyak ide secara simultan dan cepat menemukan solusi. Kedua, karena di era global dunia berjalan begitu cepat sehingga solusi suatu masalah cepat menjadi usang, keragaman menjamin adanya regenerasi ide sehingga ide-ide baru selalu muncul.

Keragaman ini harus dikelola dan tak dilepaskan begitu saja pada "mekanisme pasar". Mekanisme pasar memiliki kecenderungan melakukan segmentasi yang berujung pada individualisme. Kebebasan individu yang mendasari kompetisi pasar. Sayangnya, individualisme ini cenderung melemahkan demokrasi. Dalam demokrasi praktis, individu hanya memiliki arti politis jika ia berkelompok.

Tidaklah heran ketika Tocqueville yang mengamati demokrasi di Amerika pada abad ke-19 mengatakan, dalam demokrasi, pengetahuan untuk membuat kombinasi atau relasi adalah ibu dari segala pengetahuan, yang lain hanyalah turunan dari pengetahuan relasional tersebut. Artinya, demokrasi hanya berjalan baik jika kita tahu bagaimana membangun relasi-relasi yang bermanfaat dan bermakna. Membangun relasi ini dilakukan dengan berbagi, bukan semata-mata hanya dari kompetisi.

* Bahan diskusi *Social Media untuk Revolusi*, Salihara, Sabtu 14 Agustus 2010

Berbagi adalah perilaku tradisional yang kembali bergaung kuat di abad ke-21 karena teknologi internet. Basis data pengetahuan terbesar di dunia, Wikipedia, dibangun dengan semangat berbagi. Inovasi terkini teknologi digital berkisar sekitar usaha agar orang dapat lebih mudah berbagi dalam media sosial. Yang utama di sini bukanlah mencari alasan kenapa orang berbagi. Orang berbagi bisa karena muncul dari altruisme atau egoisme. Yang penting di sini bukanlah mengenai motivasi berbagi, melainkan adanya sistem yang memudahkan orang untuk berbagi.

Namun, keragaman juga tak dapat dikontrol secara terpusat karena justru akan menghilangkan keragaman itu sendiri. Yang bisa dilakukan, mengelola keragaman melalui desentralisasi. Jika kita pakai asumsi bahwa orang yang paling mengerti masalah adalah orang yang mengalami masalah itu sendiri, maka yang bisa memecahkan masalah lokal hanya masyarakat lokal sendiri.

Desentralisasi artinya memberikan inspirasi bagi masalah merelakan mereka sendiri. Pusat membantu dengan membuat sistem yang membuat lokalitas dapat saling berbagi pengalaman dan belajar memecahkan masalah. Misalnya, dengan membentuk jejaring peer group yang dinamis. Desentralisasi tidak sama dengan kecilnya peran pemimpin. Desentralisasi memberi arti baru bagi kepemimpinan. Dalam sistem terdesentralisasi tantangannya adalah menciptakan cascade of leadership sehingga kepemimpinan terdistribusi dari level tertinggi hingga individu. Faktor penting untuk menciptakan kepemimpinan yang terdistribusi adalah perlunya tipe pemimpin inspirator yang mampu memberikan inspirasi bagi bawahannya untuk jadi pemimpin di lingkup dia sendiri. Contoh sukses organisasi politik yang mampu mendistribusikan kepemimpinan adalah organisasi kampanye Barack Obama. Obama tentunya seorang pemimpin kharismatik. Namin, karisma saja tidak cukup.

Seperti dikatakan ahli strategi utama Obama yang juga dosen di Universitas Harvard, Marshall Ganz, keberhasilan Obama banyak berutang dari sistem organisasi yang dibangun, di mana meskipun Obama tetap memegang kendali utama, dibentuk organisasi dengan disiplin tinggi yang mendistribusikan kepemimpinan sampai tingkat terendah. Organisasi ini dibangun bukan sekadar untuk mereplikasikan ide dan narasi Obama, melainkan lebih untuk memunculkan narasi personal yang muncul dari bawah yang terus bergulir membentuk gerakan akar rumput. Yang menjadi lawan kepemimpinan inspiratif adalah feodalisme. Feodalisme memberikan insentif bagi individu untuk menghamba dan mematikan kreativitas untuk memecahkan masalah. Feodalisme mendorong kelompok lokal lebih berusaha menyenangkan atasan daripada menyelesaikan masalah di bawah. Mengabaikan pemberdayaan lokal dapat jadi bumerang. Sebagai contoh, Partai Republik di AS yang terbiasa melaksanakan sistem top-down pun sekarang ini mulai menggarap dukungan akar rumput. Partisipasi akar rumput adalah kekuatan terbesar demokrasi sekaligus legitimasi tertinggi.

Pengetahuan yang terdistribusi

Dalam rezim demokrasi, setiap kebijakan publik harus memenuhi dua syarat mutlak: kebijakan yang berkualitas dan baik untuk demokrasi itu sendiri. Kedua tuntutan ini sering dianggap saling bertentangan. Tuntutan untuk menghasilkan kebijakan publik dengan kualitas tinggi sering dijadikan alasan untuk memberikan kewenangan penuh pada pakar atau teknokrat. Logikanya sederhana: jika ingin kebijakan sebagai solusi masalah maka serahkan pada ahlinya.

Di sisi lain, menyerahkan sepenuhnya pembuatan kebijakan pada sekelompok ahli dibalik pintu tertutup yang tidak diketahui publik mengurangi kualitas demokrasi. Esensi demokrasi adalah memberikan kesempatan yang sama ke semua orang untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Sehingga dominasi ahli mencederai prinsip kesamaan kesempatan ini.

Sepintas demokrasi memang bukan sistem yang natural. Misalnya, ketika berhadapan dengan situasi medis yang gawat, lebih natural kita menyerahkan keputusan pada dokter ahli daripada melakukan pemungutan suara diantara teman dan kerabat kita mengenai tindakan apa yang harus diambil.

Retorika keahlian – seperti dokter menolong pasien yang sakit keras atau pemadam kebakaran yang memadamkan api sehingga mencegah korban lebih besar – sering dipakai sebagai metafora dari sebuah kebijakan kontroversial.

Sehingga pertanyaannya adalah jika seorang ahli lebih tahu cara penyelesaian masalah, lalu apakah otomatis ahli tersebut menjadi pemimpin yang harus kita ikuti?

Jawaban lengkap pertanyaan di atas tentunya memerlukan eksposisi yang mendetail. Apa yang ingin saya sampaikan disini hanyalah argumen teoritis yang saya pikir dapat menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya.

Metafor dokter atau pemadam kebakaran adalah karikatur. Sebagaimana layaknya sebuah karikatur, ia berguna karena melebih-lebihkan satu sisi dan menyembunyikan sisi lainnya.

Terdapat dua perbedaan utama situasi medis atau kebakaran dengan proses pengambilan kebijakan publik dalam rejim demokrasi. Pertama, ketika kita mengakui bahwa dokter memang ahli menyembuhkan penyakit. Artinya kita bisa mengidentifikasi ahli dan keahliannya memang relevan dengan masalah yang dihadapi. Kedua, kita memberikan consent kepada dokter untuk mengambil tindakan terhadap tubuh kita.

Dalam domain pemerintahan, consent ini bermasalah. Biasanya kita tidak memberikan consent kepada ahli atau teknokrat tapi kepada pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, tidak semua orang memilih pejabat yang berkuasa tetapi kebijakan yang dia buat berlaku baik untuk mereka yang memilihnya maupun yang tidak.

Penyelesaian masalah consent ini sangat rumit dan mungkin belum ada

solusi praktisnya. Tetapi alasan pertama tentang kesulitan mengidentifikasi ahli dan keahliannya memutus argumen bahwa seorang ahli otomatis memiliki otoritas untuk memimpin. Penjelasannya sebagai berikut.

Misalkan anda seorang penganut agama yang salah dan percaya bahwa pemimpin harusnya seorang penganut agama yang benar. Karena anda tidak tahu bahwa agama anda salah, maka anda memilih pemimpin yang sama agamanya dengan anda; meskipun agama anda dan pemimpin ini salah. Masalahnya disini adalah anda tidak mengenali siapa ahli yang benar. Jadi meskipun anda percaya bahwa ahli harus memimpin, tidak otomatis ahli menjadi pemimpin karena sulit mengidentifikasi secara pasti ahli tersebut.

Lalu bagaimana solusinya?

Karena penilaian tentang keahlian bergantung pada domain pengetahuan yang digunakan, maka untuk meningkatkan kemungkinan menemukan ahli yang legitimasinya diakui dari berbagai sudut pandang perlu melibatkan lebih banyak domain pengetahuan. Singkatnya, kita perlu memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Partisipasi publik ini bukan hanya penting untuk memberikan legitimasi demokratis tapi juga untuk meningkatkan kualitas kebijakan.

Metoda penyelesaian masalah yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Sebuah masalah besar dipecah menjadi masalah-masalah yang lebih spesifik. Selanjutnya masalah-masalah spesifik tersebut dipecahkan oleh ahlinya masing-masing. Artinya ahli adalah spesialis, dan spesialis bermanfaat memecahkan masalah spesifik yang sama dengan spesialisasinya.

Untuk masalah sederhana yang dapat dipecah, kita tidak kesulitan menentukan spesialisasi apa yang dibutuhkan. Tetapi banyak masalah kompleks yang dihadapi kita sekarang – misalnya kemiskinan, pendidikan, kesehatan – yang sulit dipecah menjadi sub masalah yang terpisah-pisah. Konteks sosial, sejarah, budaya, dan geografis yang unik menambah derajat kompleksitas masalah; sehingga kita tidak bisa sekedar menggabungkan para spesialis.

Artinya, penyelesaian masalah secara hirarkis tidak akan mampu mengatasi masalah dan konteks yang sangat bervariasi. Partisipasi lokal yang dinamis (juga dikenal sebagai *wisdom of the crowd*) menjadi salah satu cara untuk merespon variasi yang tinggi ini karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sosial yang terus menerus.

Kesimpulannya, legitimasi demokratis yang berkualitas dapat diraih dengan memobilisasi pengetahuan seluas-luasnya. Partisipasi publik dapat menyelesaikan apa yang dianggap Hayek sebagai masalah fundamental yang harus diselesaikan ilmu sosial dan pemerintahan demokratis: bagaimana menggunakan pengetahuan yang tersebar di setiap orang.